

Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo

Putri Fadillah Ibrahim¹, Sastro M. Wantu², Roni Lukum³

**^{1,2,3} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo**

Corresponding Author: putrifadillahibrahim13@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PKH di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo. Fokus utama evaluasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak program terhadap penerima manfaat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari aparat kelurahan, petugas PKH, serta keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan PKH di Kelurahan Huangobotu telah berjalan cukup efektif dengan dukungan dari berbagai pihak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan PKH di Kelurahan Huangobotu telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan anak. Penelitian ini mencakup peningkatan sosialisasi dan pengawasan serta pemberian pelatihan kepada petugas lapangan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Evaluasi Kebijakan, Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a government initiative aimed at reducing poverty and improving public welfare through the provision of conditional social assistance to underprivileged families. This study aims to evaluate the implementation of the PKH policy in Huangobotu Urban Village, Duingi Subdistrict, Gorontalo City. The evaluation focuses on three main aspects: planning, implementation, and the impact of the program on beneficiaries. The study employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and document analysis. Research informants include village officials, PKH facilitators, and recipient families. The findings show that the implementation of the PKH policy in Huangobotu Subdistrict has been relatively effective, supported by the collaboration of various stakeholders. The results also indicate that the PKH policy has contributed positively to improving the welfare of beneficiary families, particularly in the areas of children's education and health. This study highlights the importance of enhancing socialization, strengthening supervision, and providing training to field officers to ensure the program operates more effectively and sustainably.

Keywords: Family Hope Program, Policy Evaluation, Social Welfare

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan struktural yang bersifat kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan rendahnya kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan sosial dasar lainnya. Di Indonesia, sebagai negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai tantangan pembangunan, masalah kemiskinan masih menjadi prioritas utama dalam agenda kebijakan nasional. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan publik yang layak dan memadai.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 telah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria tertentu. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, dengan cara mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui PKH, keluarga yang memiliki ibu hamil, balita, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, atau lansia berhak menerima bantuan tunai bersyarat selama mereka memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti pemeriksaan kesehatan rutin dan memastikan kehadiran anak di sekolah. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sebagai sebuah kebijakan publik, implementasi PKH perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Evaluasi kebijakan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, kecukupan, dan ketepatan suatu kebijakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Idris (2020), keenam indikator evaluasi tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keberhasilan atau kegagalan kebijakan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Evaluasi tidak hanya bertujuan untuk mengetahui hasil akhir, tetapi juga penting untuk menilai proses pelaksanaan, kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan kebijakan, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan.

Dalam konteks Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan hasil observasi dan data awal yang diperoleh peneliti, ditemukan bahwa sebagian penerima bantuan belum sepenuhnya memahami maksud dan tujuan program, sehingga dana yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan anak malah digunakan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Selain itu, masih terdapat keluarga yang seharusnya layak menerima bantuan namun belum terdata dalam program, yang menimbulkan kecemburuan sosial dan kesenjangan

antarwarga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pemerataan dan ketepatan sasaran masih menjadi persoalan krusial dalam pelaksanaan program.

Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi petugas pendamping PKH maupun aparat kelurahan, yang menyebabkan kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor. Program ini juga masih menghadapi hambatan dari sisi administratif, seperti validasi data yang belum optimal dan keterlambatan pembaruan data keluarga penerima manfaat. Padahal, keberhasilan program seperti PKH sangat bergantung pada validitas data dan partisipasi aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat itu sendiri.

Dari sisi teori, pelaksanaan kebijakan publik seperti PKH dapat ditinjau dari beberapa pendekatan, antara lain teori kesejahteraan sosial, yang menekankan peran negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi warganya; teori kapabilitas, yang berfokus pada penguatan kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai penting; serta teori administrasi publik, yang melihat pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hal ini, pelaksanaan PKH seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk distribusi bantuan tunai, tetapi juga sebagai upaya negara dalam membangun sistem pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Melihat kondisi di atas, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Huangobotu menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan PKH berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, serta menganalisis sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek pendidikan sebagai salah satu komponen utama program. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk masukan kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar pelaksanaan PKH di masa mendatang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata dalam menanggulangi kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat kelurahan, petugas PKH, dan keluarga penerima manfaat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Kelurahan Huangobotu menunjukkan komitmen dan kesungguhan dalam mengimplementasikan program ini, terutama melalui sinergi antara aparat kelurahan dan petugas lapangan dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan pandangan Suharto (2021) yang menyatakan bahwa sebuah instansi dalam menjalankan kebijakannya harus memiliki arah dan orientasi yang tepat agar pelaksanaan kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi terhadap program PKH dilakukan dengan menggunakan enam indikator kebijakan, yaitu efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan. Berikut uraian masing-masing indikator berdasarkan temuan penelitian:

a. Efektivitas

Indikator efektivitas menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini tercermin dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan. Bantuan PKH telah mampu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam hal pengeluaran untuk pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan. Melalui observasi dan wawancara, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat merasakan manfaat langsung dari bantuan tersebut, seperti kemampuan untuk membeli perlengkapan sekolah, membayar biaya transportasi anak ke sekolah, hingga memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Efektivitas juga tercermin dari data penurunan jumlah penerima bantuan PKH dari tahun ke tahun, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi sebagian keluarga sehingga tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima. Hal ini mendukung pendapat Pasolong (2014) yang menekankan pentingnya efektivitas dalam kebijakan pelayanan publik untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap program pemerintah. Penurunan angka penerima PKH juga menjadi indikator bahwa tujuan jangka panjang program, yakni memutus rantai kemiskinan, mulai menunjukkan hasil.

b. Efisiensi

Pelaksanaan program PKH juga dinilai efisien, terutama dalam mekanisme penyaluran dana. Dana bantuan disalurkan secara langsung ke rekening penerima manfaat tanpa melalui pihak ketiga, sehingga mempercepat proses pencairan dan menghindari potensi penyimpangan. Masyarakat dari berbagai kelompok usia pun merasa terbantu dengan sistem ini karena tidak membutuhkan perantara. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses pencairan dana yang efisien telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Efisiensi ini juga dipertegas oleh Riani (2021) yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pelayanan publik merupakan faktor penting dalam mewujudkan

keadilan sosial. Penurunan jumlah penerima PKH juga menjadi cerminan bahwa sebagian penerima sebelumnya telah berhasil mandiri secara ekonomi, yang menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong kemandirian.

c. Pemerataan

Dalam aspek pemerataan, pelaksanaan PKH di Kelurahan Huangobotu telah melibatkan partisipasi aktif semua unsur terkait, seperti aparat kelurahan, RT/RW, dan kepala lingkungan. Proses musyawarah dilakukan secara menyeluruh untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi evaluasi lapangan dan memperkuat asas keadilan sosial dalam kebijakan publik. Dana PKH sendiri bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Permensos No. 1 Tahun 2018 Pasal 57. Penelitian ini mendukung pandangan Idris (2020) yang menekankan pentingnya pemerataan dalam kebijakan publik untuk mencegah kecemburuan sosial. Sosialisasi yang dilakukan juga membantu masyarakat memahami kriteria dan tujuan program secara utuh, sehingga pelaksanaannya dapat diterima secara luas dan adil.

d. Kecukupan

Meskipun nominal bantuan yang diberikan relatif kecil, namun bantuan tersebut dirasakan cukup membantu oleh masyarakat miskin, terutama oleh kelompok lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga dengan anak usia sekolah. Bantuan PKH telah mampu mengurangi beban pengeluaran rutin rumah tangga, sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Penerima bantuan mengungkapkan bahwa dana yang diterima sangat berguna untuk membeli kebutuhan pokok, biaya sekolah, dan pengobatan dasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Benny (2019) yang menyatakan bahwa indikator kecukupan dalam evaluasi kebijakan sangat berperan penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga miskin. Program ini tidak hanya membantu secara materiil, tetapi juga memberi rasa aman dan harapan akan kehidupan yang lebih baik.

e. Responsivitas

Masyarakat penerima bantuan menunjukkan sikap yang responsif terhadap program PKH. Mereka aktif mengikuti sosialisasi, memberikan umpan balik terhadap pelayanan, serta menunjukkan antusiasme dalam proses pencairan bantuan. Respons yang baik dari masyarakat menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan komunikasi antara pemerintah dan warga telah berjalan efektif. Responsivitas masyarakat juga penting untuk meminimalisir kesalahpahaman informasi serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan pendapat Lucyane (2021) yang menyatakan bahwa respons masyarakat yang positif merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan publik dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

f. Ketepatan

Indikator ketepatan menyangkut sejauh mana program PKH dapat disalurkan kepada individu atau keluarga yang benar-benar membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan

penerima bantuan di Kelurahan Huangobotu dilakukan dengan hati-hati melalui verifikasi dan validasi data secara langsung di lapangan. Sinergitas antara aparat kelurahan dan pihak-pihak terkait sangat menentukan dalam memastikan ketepatan sasaran. Hal ini penting untuk menjaga integritas program dan memastikan bahwa bantuan tidak jatuh ke tangan yang salah. Susanto (2016) juga menekankan bahwa ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial merupakan kunci utama dalam pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Upaya Pemerintah Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Komponen Pendidikan (TK, SD, SMP dan SMA) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo

a. Kebijakan dalam Perspektif

Pemerintah Kelurahan Huangobotu menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya bagi masyarakat yang belum menunjukkan kemandirian secara ekonomi meskipun telah beberapa kali menerima bantuan. Sebagai bentuk tanggung jawab dalam kebijakan publik, pemerintah kelurahan mengambil langkah strategis melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada keluarga penerima manfaat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya, terutama dalam mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Sosialisasi dilakukan secara berkala agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme program, sekaligus mengedukasi penerima bantuan agar lebih bijak dalam mengelola dana yang diterima. Upaya ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan prinsip kebijakan publik berbasis kesejahteraan. Pemerintah kelurahan juga menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan tingkat lokal dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi, terutama bagi keluarga miskin.

Dengan adanya peran aktif pemerintah kelurahan dalam mendampingi pelaksanaan PKH, diharapkan masyarakat penerima bantuan dapat lebih mandiri secara ekonomi dan mampu keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di tingkat lokal maupun nasional.

b. Kebijakan dalam Perspektif Pendidikan

Pada aspek pendidikan, implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Huangobotu telah memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diberikan melalui PKH terbukti meringankan beban pengeluaran pendidikan, seperti biaya perlengkapan sekolah, transportasi, hingga kebutuhan pendukung lainnya. Hal ini sangat dirasakan oleh keluarga yang memiliki anak bersekolah, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA.

Melalui bantuan PKH, banyak anak dari keluarga miskin yang dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus khawatir terhadap keterbatasan biaya. Hal ini turut membantu menekan angka putus sekolah dan mendorong pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut. Pemerintah kelurahan secara konsisten menjalankan perannya dalam menyalurkan informasi, memfasilitasi proses pendataan, serta memastikan bahwa bantuan tersalurkan tepat sasaran.

Sinergi antara pemerintah kelurahan dan pemerintah pusat dalam pelaksanaan PKH pada sektor pendidikan merupakan bentuk implementasi kebijakan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat penting untuk terus didorong dan dievaluasi secara berkala agar tujuan jangka panjang, seperti pemutusan rantai kemiskinan melalui pendidikan, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo secara umum telah berjalan cukup baik. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan, program ini dinilai efektif dan efisien dalam membantu keluarga miskin, terutama dalam meringankan biaya pendidikan dan kesehatan. Pemerataan bantuan telah dilakukan melalui proses musyawarah dan verifikasi data bersama aparat kelurahan dan masyarakat, sehingga sasaran penerima bantuan menjadi lebih tepat. Meskipun nilai bantuannya relatif kecil, program ini cukup membantu dan diterima baik oleh masyarakat, khususnya oleh kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak usia sekolah. Upaya pemerintah dalam komponen pendidikan juga terbukti berdampak positif, karena membantu keberlanjutan sekolah anak-anak dari jenjang TK hingga SMA, serta mencegah potensi anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta validasi data yang belum optimal. Secara keseluruhan, PKH telah menjadi sarana pendukung peningkatan kesejahteraan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan sumber daya manusia di tingkat lokal secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Amirullah. (2020). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Camat Batulappa Kabupaten Pinrang. Makassar: STIE Nobel Indonesia.
- Benny, M. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cakung Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Hartono, M. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Journal of Banking and Financial Technology*, 1(1), 4–6.
- Idris, P. (2020). Kebijakan Publik Daerah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Laluhang, S. M. (2014). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). E-Jurnal Unsrat.
- Lucyane, D. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Ayong Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal IDEAS*, 9(2).
- Mohi, A. S., & Botutihe, A. H. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(1).
- Mubyarto. (2010). Pengantar Pendidikan Ekonomi dalam Kemasyarakatan. Jakarta: Erlangga.
- Nopiana, Mozin. (2021). Pemberdayaan Perangkat Desa dalam Penguatan Kelembagaan Desa Talaki. *Jurnal Pemerintahan Desa*, 2(2).
- Pasolong, H. (2014). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Riani, N. (2021). Strategi Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11).
- Sadiman, A. S., dkk. (2011). Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, E. (2021). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, H. (2016). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH). E-Jurnal Repository UIN, 1(2).
- Syahputera, A. (2017). Program Keluarga Harapan: Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: CV Widya.
- Tiara, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bulota Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(3).
- Wibisono, P. (2024). Evaluasi Kebijakan Penataan Wilayah. Bandung: Mega Press Nusantara.
- Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: Center of Publications.
- Yoga. (2017). Program Keluarga Harapan Diklaim Berhasil Dongkrak Indeks Pembangunan Manusia. Jawa Barat: CV Mega Press Nusantara.